

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
GLOSARIUM	ix
DAFTAR SINGKATAN	xiii
RINGKASAN	xv
SUMMARY	xxxix
KATA PENGANTAR	lx
DAFTAR ISI	lxiii
DAFTAR TABEL	lxix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Secara Teoritis	14
2. Manfaat Secara Praktis	14

E. Kerangka Konseptual	15
F. Kerangka Teori Disertasi	27
1. Teori Keadilan sebagai <i>Grand Theory</i>	23
2. Teori Hak sebagai <i>Grand Theory</i>	40
3. Teori Efektivitas Hukum sebagai <i>Middle Theory</i>	42
4. Teori Kepastian Hukum sebagai <i>Middle Theory</i>	47
5. Teori Sistem Peradilan Pidana sebagai <i>Applied Theory</i>	54
6. Teori Hukum Progresif sebagai <i>Applied Theory</i>	64
G. Kerangka Pemikiran	75
H. Metode Penelitian	78
1. Paradigma Penelitian Konstruktivisme	78
2. Metode Pendekatan Penelitian	79
3. Sumber Data	80
4. Metode Pengambilan Data	82
5. Analisa Data	83
I. Original Penelitian	84
J. Sistematika Penulisan	86
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	88
A. Pengertian Eksepsi atau Keberatan	88
B. Praperadilan	88
1. Sejarah Lahirnya Praperadilan	88
2. Pengertian Praperadilan	92
3. Obyek Praperadilan	94
4. Fungsi dan Tujuan Praperadilan	96

5. Pihak yang dapat Mengajukan Praperadilan	100
6. Acara Pemeriksaan Praperadilan	101
7. Putusan Pengadilan tentang Praperadilan	103
8. Gugurnya Praperadilan	105
9. Aturan Pelaksanaan Praperadilan	107
C. Pengertian Perkara Pidana.....	110
1. Pengertian Pelimpahan	110
2. Pengertian Persidangan Pokok Perkara Pidana	111
3. Alasan Penghapus Pidana	113
 BAB III. ATURAN EKSEPSI ATAU KEBERATAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN DIKABULKANNYA PRAPERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA SAAT INI	
	114
Analisis Ruang Lingkup Eksepsi atau Keberatan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 114	
B. Analisis Tentang Aturan Praperadilan saat ini berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	117
C. Analisis Tentang Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/214 Tanggal 28 April 2015	139
D. Pelaksanaan Putusan Praperadilan Saat ini berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	143

E. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana terhadap Pelaksanaan dikabulkannya Praperadilan berdasarkan KUHAP.....	145
F. Konstruksi Aturan Eksepsi atau Keberatan dalam Persidangan Perkara Pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	160

BAB IV. PROBLEMATIKA SAAT INI TERHADAP RUANG LINGKUP EKSEPSI ATAU

KEBERATAN DALAM PERKARA PIDANA DIPENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TERHADAP PELAKSANAAN DIKABULKANNYA PRAPERADILAN	165
---	------------

A. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Permohonan Praperadilan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019	165
B. Analisis terhadap Eksepsi atau Keberatan dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Alasan di Kabulkannya Praperadilan	167
C. Analisis terhadap Putusan Praperadilan dalam Perkara No: 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. (Boediono Mantan Wapres RI)	201
Problematika Aturan Eksepsi atau Keberatan dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Alasan di Kabulkannya Praperadilan di Kaji Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum dan Teori Kepastian Hukum	204

BAB V. REKONSTRUKSI RUANG LINGKUP EKSEPSI ATAU KEBERATAN DALAM

PERKARA PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN DIKABULKANNYA PRAPERADILAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN	211
A. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	216

Aturan Eksepsi atau Keberatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUKUHAP)	211
Aturan Praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana	212
Aturan tentang eksepsi dan pelimpahan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana	218
B. Hapusnya Kewenangan Penuntutan Berdasarkan KUHP dan RUUKUHAP	
.....	214
Alasan Hapusnya Kewenangan menuntut Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	223
Alasan Hapusnya Kewenangan menuntut Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP)	
.....	227
C. Perbandingan Hukum Acara Praperadilan di Negara Belanda dan Inggris	
.....	229
Rekonstruksi Ruang Lingkup Eksepsi atau Keberatan dalam Perkara Pidana terhadap Pelaksanaan Dikabulkannya Praperadilan yang Berbasis Nilai Keadilan	
.....	264
BAB VI. PENUTUP	276
A. Kesimpulan	276

B. Implikasi Kajian Disertasi	278
1. Implikasi Teoritis	278
2. Implikasi Praktis	278
C. Saran	279
DAFTAR PUSTAKA	281



DAFTAR

TABEL/ BAGAN/ SKEMA

	Halaman
Tabel 1 Kerangka Pemikiran	77
Tabel 2 Originalitas Disertasi	84
Tabel 3 Rekonstruksi Ruang Lingkup Eksepsi atau Keberatan dalam Perkara Pidana terhadap Pelaksanaan Dikabulkannya Praperadilan yang Berbasis Nilai Keadilan	270

